BADAN POM

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II TAHUN 2020

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayat-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan II (dua) Balai POM di Pangkalpinang tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yang telah dilaksanakan pada triwulan II tahun 2020 yang merupakan tahun pertama dalam periode Renstra 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2020 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Dengan kata lain, timbul kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk mengukur dan sekaligus menginformasikan capaian kinerjanya. Hal ini juga berarti bahwa instansi pemerintah diwajibkan untuk mengubah orientasi pelaporan dari kemampuan menyerap anggaran menjadi kemampuan untuk menunjukkan capaian kinerja *output* maupun *outcome*.

Pengukuran kinerja BPOM di Pangkalpinang dilakukan dengan penilaian terhadap pencapaian indikator – indikator kinerja. Pencapaian indikator kinerja belum dapat tercapai sepenuhnya tetapi terdapat peningkatan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila dilihat dari indikator output, maka pencapaiannya telah mencapai target tahunan.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Balai POM di Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Balai POM di Pangkalpinang selama Triwulan II Tahun 2020 agar memiliki kinerja yang lebih baik di masa akan datang.

Pangkalpinang, 10 Juli 2020

Hermanto, S.Si., Apt. MPPM.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Lampiran iii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar vi

BAB I. Pendahuluan 1
1.1 Gambaran Umum Organisasi 2
1.2 Struktur Organisasi 3
1.3 Aspek Strategis Organisasi 5
1.4 Analisis Lingkungan Stategis 5
1.5 Isu Strategis 8

BAB II. Perencanaan Kinerja 12
2.1 Rencana Strategis 13
2.2 Perjanjian Kinerja 2016 17
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator 19

BAB III. Akuntabilitas Kinerja 21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 22
3.2 Realisasi Anggaran 55
3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan 60

BAB IV. Penutup 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat DAN Makanan Di Pangkalpinang Tahun 2020

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Pangkalpinang

Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Pangkalpinang

Lampiran 4. Perhitungan Tingkat Efisiensi s.d Triwulan II Balai POM di Pangkalpinang

Lampiran 5. Keberhasilan Peningkatan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Balai POM di Pangkalpinang

Lampiran 6. Sampling Pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Pangkalpinang

Lampiran 7. Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan Balai POM di Pangkalpinang

Lampiran 8. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Balai POM di Pangkalpinang

Lampiran 9. Sertifikasi Obat dan Makanan Balai POM di Pangkalpinang

Lampiran 10. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Balai POM di Pangkalpinang

Lampiran 11. Keputusan/rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Lampiran 12. Kie Dipa Balai POM di Pangkalpinang

Lampiran 13. KIE Non Dipa Balai POM di Pangkalpinang

Lampiran 14. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai POM di Pangkalpinang

Lampiran 15. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Lampiran 16. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Lampiran17. Index Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Pangkalpinang yang Optimal dan Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkalpinang yang Optimal

Lampiran 18. Tingkat Efisiensi Anggaran Balai POM di Pangkalpinang

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Balai POM di Pangkalpinang..... 6
Tabel 2.1 Tabel Sasaran Strategis sesuai Renja dan Indikator Kinerja 2020-2024 15
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Strategis BPOM di Pangkalpinang Tahun 2020-2024..... 17
Tabel 2.3 Kriteria Pengukuran Pencapaian Indikator 20
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja TA 2020 Balai POM di Pangkalpinang..... 22
Tabel 3.2 Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat Dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Pangkalpinang 27
Tabel 3.3 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 28
Tabel 3.4 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 29
Tabel 3.5 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 30
Tabel 3.6 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 31
Tabel 3.7 Hasil Pengujian Sampel Balai POM di Pangklpinang Triwulan II Tahun 2020 33
Tabel 3.8 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai POM diPangkalpinang 35
Table 3.9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan Distribusi ang dilaksanakan 36
Tabel 3.10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan 37
Table 3.11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 38
Tabel 3.12 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 39
Table 3.13 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi

Ketentuan 41
Table 3.14 Index Pelayanan Publik 42
Table 3.15 Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Masing-Masing Wilayah Kerja Balai POM di Pangkalpinang..... 43
Tabel 3.16 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan..... 44
Table 3.17 Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Masing-Masing Wilayah Kerja Balai POM di Pangkalpinang 44
Tabel 3.18 Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar..... 45
Table 3.19 Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar..... 46
Tabel 3.20 Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Efektivitas Penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan di wilayah Kerja Balai POM di Pangkalpinang 47
Tabel 3.21 Sasaran Strategis10: Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan 50
Tabel 3.22 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal..... 51
Table 3.23 Sasaran Strategis 11: Terkelolanya Keuangan Balai POM di Pangkalpinang secara Akuntabel 53
Tabel 3.24 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkalpinang..... 54
Tabel 3.25 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Pangkalpinan..... 55
Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Tiap Sasaran..... 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Pangkalpinang..... 3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM di Pangkalpinang 4
Gambar 1.3 Peta Provinsi Kep.Bangka Belitung..... 7

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai POM di Pangkalpinang sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan visi misi melalui rencana strategis tahun 2020-2024.
Pada revisi Rencana Strategis Balai POM di Pangkalpinang telah ditetapkan 12 sasaran kegiatan diantanya yaitu.

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT.
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT.
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal
9. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
11. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Pencapaian 11 sasaran strategis tersebut diukur dengan 27 (dua puluh Tujuh) indikator kinerja.

Pada Triwulan II Tahun 2020 dari **28 (Dua Puluh Delapan)** Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada tahun 2020, **4 (Empat)** dengan Baik, **4 (Empat)** dengan Kategori Cukup dan **7 (Tujuh)** dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

Pada tahun 2020 Balai POM di Pangkalpinang memperoleh anggaran sebesar Rp 20.831.967.000 Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya diupayakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan penyalahgunaan. Realisasi anggaran Balai POM di Pangkalpinang pada Triwulan II tahun 2020 yaitu sebesar 36,74%.

Balai POM di Pangkalpinang akan melakukan perbaikan kinerja untuk indikator yang belum memuaskan, sehingga dapat terwujud manajemen kinerja yang lebih produktif, efektif, dan efisien.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Badan POM menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka ditetapkan Unit Balai POM di Pangkalpinang termasuk Balai POM Tipe B dan terbentuknya Loka POM di Kabupaten Belitung

A. Tugas Pokok dan Fungsi Balai POM Pangkalpinang

Kegiatan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat, akan tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, dari hulu sampai hilir.

Berdasarkan Keputusan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka tugas pokok dan fungsi Balai POM di Pangkalpinang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM di daerah adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Fungsi Balai POM Pangkalpinang

Adapun fungsi dari Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan pengambilan contoh *(sampling)* Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk penguatan pengawasan juga dibentuk Loka POM di Belitung dengan wilayah kerja kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

1.2 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1. di bawah ini, secara garis besar Balai POM di Pangkalpinang termasuk Balai POM tipe B dan Loka POM di Kabupaten Belitung yang mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

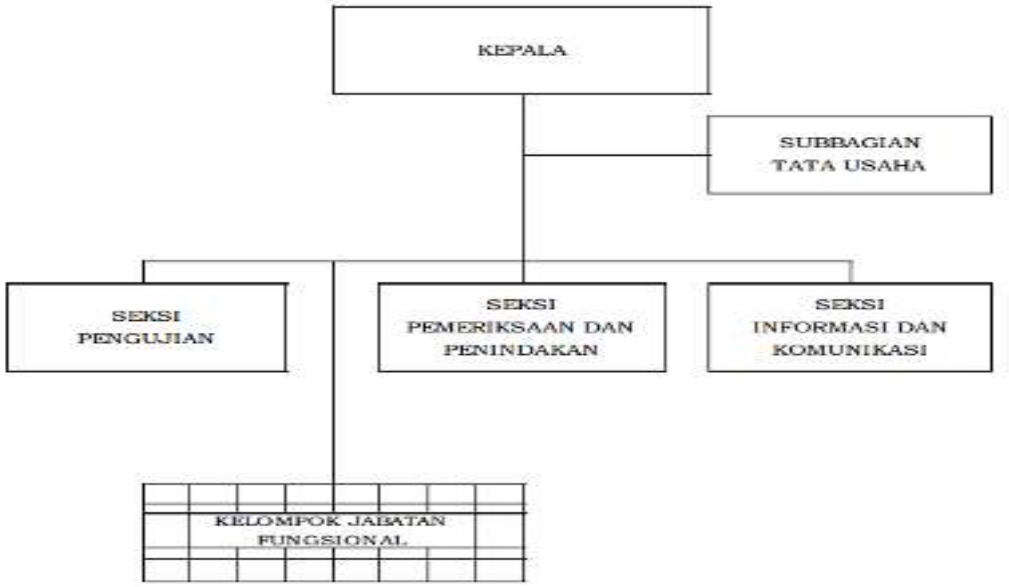

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Pangkalpinang

Adapun tugas masing-masing seksi adalah :

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan
2. Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan
3. Seksi Pemeriksaan, Penindakan mempunyai tugas melakukan Inspeksi dan Sertifikasi Sarana/Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan dan Sarana/Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Sertifikasi dan Pengambilan contoh (Sampling) produk Obat dan Makanan, serta Intelijen dan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang –undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
4. Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat, serta penyiapan Koordinasi pelaksanaan Kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

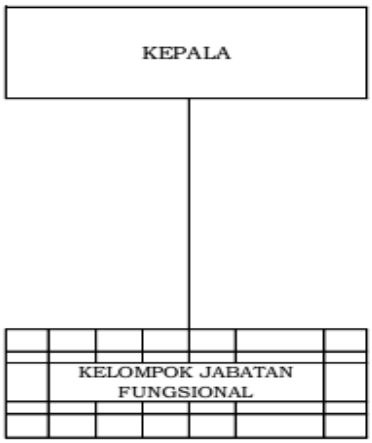

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Belitung

Adapun Tugas Loka adalah :

Melakukan Inspeksi dan Sertifikasi Sarana/Fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, Intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan pada peta strategi Badan POM, pengawasan Obat dan Makanan mempunyai dua *outcome*, yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan yang aman untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan upaya yang cukup strategis karena berdampak langsung pada perlindungan konsumen serta menjadi unsur penting dalam upaya meningkatkan daya saing produk di tingkat daerah dan nasional. Atas dasar tersebut, Balai POM di Pangkalpinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut, terlebih dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, untuk menguatkan pengawasan dari berbagai lini diperlukan koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait sehingga pengawasan dapat lebih optimal.

1.4 Analisis Lingkungan Strategis

A. Internal

BPOM di Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh sumber daya baik segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana.

Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Balai POM di Pangkalpinang

	Luas Tanah & Bangunan	**Rumah Dinas**	**Penerangan**	**Sarana Komunikasi**
Balai POM di Pangkalpinang	**L.Tanah** 5503 m^2 **L.Bangunan** 2075 m^2 **Luas Kantor** 780 m^2 **Luas Laboratorium** 1295 m^2	Belum ada, Rumah dinas berupa rumah kontrak	197.000 watt - **kantor** : 33.000 watt - **Laboratorium**: 164.000 watt	- **Saluran telepon** (ruang pimpinan, ULPK, dan Tata Usaha) - Internet VPN, Jaringan Speedy dan E-mail kantor - Tiap ruangan terhubung dengan telepon extension sebanyak 31 unit - Conference Video - Lan sever internal

Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan I tahun 2020 , Balai POM di Pangkalpinang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 48 (Empat Puluh Sembilan) orang yang terdiri dari 5 orang Struktural (1 orang Kepala Balai, 3 Orang Kepala Seksi dan 1 orang Kepala Sub Bagian) serta 12 orang staf tata usaha, 21 orang staf pengujian, 11 orang staf Pemeriksaan dan Penindakan dan 4 orang staf Seksi Informasi dan Komunikasi. Selain PNS terdapat juga 19 orang PPNPN di Balai POM di Pangkalpinang.

A. Eksternal

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk berdasarkan UU No. 27 Tahun 2000. Berdasarkan kondisi tersebut wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang dan Loka POM di Kabupaten Belitung digambarkan sebagai berikut :

1. Data Umum Wilayah Kerja

a. Luas Wilayah Kerja

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas 18.725,14 km2, dimana sebagian besar merupakan wilayah perairan mencapai 79,90%.

Gambar 1.3 Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b. Jumlah Kabupaten/Kota

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu: Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur dan kota Pangkalpinang dengan jumlah kecamatan sebanyak 47 dan jumlah desa/kelurahan sebanyak 381. Balai POM di Pangkalpinang mempunyai wilayah kerja Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan kota Pangkalpinang sedangkan Loka POM di Kabupaten Belitung mempunyai wilayah kerja Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur.

c. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Untuk menjangkau wilayah Pulau Bangka perjalanan dapat ditempuh menggunakan transportasi darat dan laut dengan waktu 1 – 3 jam. Sedangkan untuk wilayah Pulau Belitung perjalanan dapat ditempuh menggunakan transportasi darat dan laut dengan waktu 1 - 3 jam.

d. Waktu yang Diperlukan di satu Wilayah Kerja

Waktu yang diperlukan petugas Balai POM Pangkalpinang dan Loka POM di Kabupaten Belitung di satu wilayah kerja berkisar antara 2 - 3 hari.

1.5 ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kep. Bangka Belitung muncul isu-isu strategis yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai POM di Pangkalpinang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai POM di Pangkalpinang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
2. Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area* (*FTA*) diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, ASEAN-*China FTA*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).* Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.
3. Adanya jejaring kerja yang dimiliki Balai POM di Pangkalpinang diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, Indonesia *Criminal Justice System* (ICJS). Selain itu, Balai POM di Pangkalpinang juga berperan aktif dalam dalam jejaring kerja baik di

tingkat Provinsi dan Kabupaten guna mengawal kepentingan daerah di bidang Obat dan Makanan serta peningkatan daya saing produk. Tantangan yang dihadapi Balai POM di Pangkalpinang terkait jejaring kerjasama ini diantaranya (i) *Upstream Notification* masih belum optimal, (ii) Asesmen risiko keamanan pangan impor masih belum optimal, (iii) Tindak lanjut notifikasi di *Competent Contact Point* (CCP) belum cepat, dan (iv) Sistem *traceability* di rantai suplai pangan masih lemah.

4. Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
   a. *Goal* 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
   b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.
5. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
6. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsitem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.
10. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
11. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
12. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans
13. Tingginya pertumbuhan sektor industry obat dan makanan, termasuk UMKM
14. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk
15. Perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi khusunya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

16. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Pangkalpinang untuk dapat melakukan pelayanan secara *online,* yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja pengawasan obat dan makanan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan ditetapkannya RPJMN 2020-2024, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Renstra Tahun 2020-2024 yang menjadi dasar ditetapkannya Renstra Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Pangkalpinang 2020-2024 merupakan suatu dokumen perencanaan indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai POM di Pangkalpinang. Rencana Strategis Balai POM di Pangkalpinang 2020-2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dalam kurun waktu 2020-2024. Renstra ini dibuat sesuai dengan SOTK baru Badan POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Secara ringkas, subtansi Renstra Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut

I. Visi

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

II. Misi

Memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan obat dan makanan sampai ke masyarakat terjamin aman, bermutu, berkhasiat

Memfasilitasi pengembangan industri obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM

Memperkuat kemitraan dengan lintas sektor, lintas kepemerintahan, akademisi, masyarakat, media, dan peran serta masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan

III. Budaya Organisasi

Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas,

Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi

Kredibilitas
Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional

Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik

Inovatif
Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini

Responsif / Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsive dalam mengatasi masalah

Visi, Misi, Budaya Organisasi

IV. TUJUAN

1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan Global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi

Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Pangkalpinang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Pangkalpinang. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Pangkalpinang akan dapat mencapai sasaran strategis serta mengacu pada Revisi Renstra Badan POM 2020 – 2024 maka Sasaran Strategis, indikator kinerja dan target dari Balai POM di Pangkalpinang selama lima tahun (2020-2024) telah ditetapkan seperti tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tabel Sasaran Strategis sesuai Renstra dan Indikator Kinerja 2020-2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	81,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	70
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	5
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	81
		Nilai AKIP UPT	81
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (90%)

Dari Indikator tersebut diatas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Pangkalpinang adalah:

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat
3. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat
5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebut sebagai Perjanjian Kinerja

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transpansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud komitmen dari penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kepala BPOM di Pangkalpinang menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang baru yaitu mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2020 dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang diwujudkan serta target yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BPOM di Pangkalpinang sesuai Rencana Kinerja 2020 , sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Strategis BPOM di Pangkalpinang Tahun 2020-2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	81,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	70
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	5
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	81
		Nilai AKIP UPT	81

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (90%)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014, maka BPOM di Pangkalpinang sebagai unit kerja eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BPOM di Pangkalpinang) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian Kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memanau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BPOM di Pangkalpinang selalu dimonitoring setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya.

2.3 KRITERIA PENCAPAIAN

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang tahun 2020 terdapat 12 sasaran strategis dengan 27 indikator kinerja yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran.

Untuk dapat mengukur kinerja, baik kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan digunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam pencapaian indikator pada LAKIP ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Kriteria Pengukuran Pencapaian Indikator

Kriteria	Capaian
Tidak dapat disimpulkan	x > 120%
Sangat Baik	110% < x ≤ 120%
Baik	90% ≤ x < 110%
Cukup	70% ≤ x < 90%
Kurang	50% ≤ x < 70%
Sangat Kurang	< 50%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan KInerja Instansi Pemerintah, pada setiap akhir periode suatu instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Dalam pelaporan ini akan dibandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja beserta analisisnya sesuai Penetapan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2019.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang tahun 2019 terdapat 11 sasaran strategis dengan 28 indikator kinerja kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran. Capaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja TA 2020 Balai POM di Pangkalpinang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s.d TW.2 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8%	76,33%	94,47%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%	70,97%	90,98%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78%	62,79%	80,50%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70%	100%	142,86%
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s.d TW.2 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang				
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	70%	98,46%	140,66%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	18%	42,50%	236,11%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	30%	100%	333,33%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20%	28,57%	142,86%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20%	55,20%	276,00%
		Index Pelayanan Publik	-	0	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s.d TW.2 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	94,38%	134,83%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	20% (Progress)	20% (Progress)
		Jumlah desa pangan aman	-	25% (Progress)	25% (Progress)
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	-	25% (Progress)	25% (Progress)
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40%	38,51%	96,27%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	42,73%	85,46%
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,50%	19,38%	86,13%
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Pangkalpinang yang optimal	Indeks RB UPT	-	-	-
		Nilai AKIP UPT	-	-	-
9.	Terwujudnya SDM Balai POM di Pangkalpinang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s.d TW.2 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	0,55	-
11.	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Pangkalpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	55%	51,61%	93,84%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90%	86%	95,56%

Ket: Matrik Capaian ini telah disesuaikan dengan target Renstra 2020-2024.

Terhadap capaian sasaran strategis tersebut, Balai POM di Pangkalpinang melakukan beberapa analisis dan evaluasi. Analisis capaian kinerja tersebut tertuang pada bagian berikut ini.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan pencapaian sasaran diukur dengan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu,.

1. Persentase obat yang memenuhi syarat.
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
14. Index Pelayanan Publik
15. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
17. Jumlah desa pangan aman
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
22. Indeks RB UPT
23. Nilai AKIP UPT
24. Indeks Profesionalitas ASN UPT
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
26. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
28. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Dari **28 (Dua Puluh Delapan)** Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada tahun 2020, **4 (Empat)** dengan Baik, **4 (Empat)** dengan Kategori Cukup dan **7 (Tujuh)** dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

SS 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Pangkalpinang

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terdiri dari 4 indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU). Secara umum sasaran pertama tersebut dicapai melalui kegiatan sampling atau pengambilan contoh oleh Seksi Pemeriksaan dan Penindakan dan pengujian sampel obat dan makanan oleh Seksi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang.

Tabel 3.2 Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat Dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Pangkalpinang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8%	76,33%	94,47%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%	70,97%	90,98%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78%	62,79%	80,50%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70%	100%	142,86%

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 4 (Empat) indikator sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Tabel 3.3 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8%	76,33%	94,47%	Baik

Dari hasil pengujian komoditi Obat diperoleh data sampai dengan triwulan II sampel obat yang memenuhi syarat sebesar 76,33% dengan capaian sebesar 94,47% dan realisasi 76,33% apabila dibandingkan dengan target yaitu 80,80%. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel acak Obat yang sudah selesai diuji di laboratorium dan memenuhi syarat sebanyak 129 sampel dari jumlah sampel obat yang disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 169 sampel. Jenis Obat yang disampling sesuai kategori obat pada dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan Badan POM adalah Obat yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi Obat Program Pemerintah, Obat untuk pengobatan spesifik, obat yang memerlukan perhatian khusus, vaksin. Sedangkan kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Definisi Operasional adalah:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
2) Produk kedaluwarsa/produk rusak
3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

Apabila kita membandingkan terhadap target Triwulan II, maka capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (80,80%), capaiannya sudah mencapai 94,47% dengan kriteria Sangat Baik.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

1. Pengawasan Sarana Distribusi Obat yang lebih intensif
2. Penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran di bidang obat

3. Pembinaan kepada pelaku usaha
4. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat.
5. Pencanangan Aksi Penyalahgunaan Obat dan Pemberantasan Obat Ilegal
6. Intensifikasi pengawasan peredaran obat illegal.

Dalam mempertahankan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

1. Intensifikasi terhadap pengawasan obat *recall* dan diduga palsu.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap pemahaman CDOB untuk sarana distribusi obat baik yang diadakan oleh Badan POM sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholder.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana distribusi obat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pemberantasan obat illegal dan penyalahgunaan obat.

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Tabel. 3.4 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%	70,97%	90,98%	Baik

Dari hasil pengujian komoditi Makanan yang memenuhi syarat diperoleh Makanan yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II dengan realisasi sebesar 70,97% dan capaian 90,98% makanan yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel Acak Makanan yang diuji di laboratorium dan memenuhi syarat sebanyak 22 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Makanan yang disampling di

wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 31 sampel. Jenis Makanan yang disampling sesuai kategori pada dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan Badan POM adalah Makanan yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya Sedangkan kriteria Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Definisi Operasional adalah

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
2) Produk kedaluwarsa/produk rusak
3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

Apabila kita membandingkan terhadap target sampai dengan Triwulan II sebesar 78,00% maka capaian kinerja sasaran ini telah melebihi capaian target yang ditetapkan, capaian baru sebesar 90,98% dari target dengan Kriteria Baik.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Tabel 3.5 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78%	62,79%	80,50%	**Cukup**

Dari hasil pengujian komoditi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh Obat sampel Targeted yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II realisasinya sebesar 62,79% dengan capaian sebesar 80,50% sampel Obat Targeted yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel Obat Targeted yang diuji di laboratorium dan memenuhi syarat pada Triwulan II sebanyak 27 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Obat Targeted yang disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 43 sampel. Jenis sampel Obat Targeted yang disampling sesuai kategori Obat Targeted pada dokumen Pedoman Sampling

yang ditetapkan Badan POM adalah Obat yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dan telah diuji semua. Sedangkan kriteria Obat Targeted yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Definisi Operasional adalah

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
2) Produk kedaluwarsa/produk rusak
3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

Apabila kita membandingkan terhadap target Triwulan II, maka capaian kinerja sasaran ini telah mencapai target yang ditetapkan (78,00%), dengan capaiannya 80,50% dengan kriteria Cukup.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Tabel 3.6 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70%	100%	142,86%	**Tidak Dapat disimpulkan**

Dari hasil pengujian komoditi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh sampel Makanan Targeted yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II realisasinya sebesar 100% dengan capaian sebesar 142,86% Makanan Targeted yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel Makanan Targeted yang diuji di laboratorium dan memenuhi syarat sebanyak 45 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Makanan yang disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 45 sampel. Jenis Makanan Targeted yang disampling sesuai kategori Makanan pada dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan Badan POM adalah Makanan Targeted yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya .Apabila kita membandingkan terhadap target Triwulan II, maka

capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (70,00%), capaiannya sudah mencapai 142,86 % dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

1. Pengawasan Sarana Produksi yang lebih intensif dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
3. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk pangan mengenai Pangan yang memenuhi ketentuan (misalnya kegiatan intensifikasi pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Natal, Tahun Baru.

Dalam mencapai capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

1. Intensifikasi terhadap pengawasan pangan Tanpa Izin Edar (TIE)
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana distribusi pangan.
4. Meningkatkan koordinasi dan kapasitas lintas sektor dalam memberikan pembinaan kepada UMKM.
5. Meningkatkan kualitas pembinaan dan penyebaran informasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat terhadap makanan bermutu dan aman sehingga persentase makanan yang memenuhi syarat lebih meningkat.

Tabel 3.7 Hasil Pengujian Sampel Balai POM di Pangkalpinang s.d Triwulan II Tahun 2020

Komoditi	Target Sampel DIPA	Realisasi Sampling	Sampel Selesai uji sesuai standar	Hasil Pengujian			Uraian TMS
				MS	TMS		
					Mutu	Label	
Obat	185	85	47	54	0	0	MK Penandaan dan TMS uji laboratorium : 0 TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium : 0 TMK Penandaan dan TMS uji laboratorium : 0
Obat Tradisional	135	67	56	52	4	0	MK Penandaan dan TMS uji laboratorium : 2 TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium : 24 TMK Penandaan dan TMS uji laboratorium : 2
Suplemen Makanan	45	21	14	11	3	0	MK Penandaan dan TMS uji laboratorium : 3 TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium : 1 TMK Penandaan dan TMS uji laboratorium : 0
Kosmetik	267	113	88	88	0	0	MK Penandaan dan TMS uji laboratorium :0 TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium : 24 TMK Penandaan dan TMS uji laboratorium : 0
Pangan	227	118	76	76	0	0	MK Penandaan dan TMS uji laboratorium : 0 TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium : 9 TMK Penandaan dan TMS uji laboratorium : 0
TOTAL	**859**	**404**	**281**	**281**	**7**	**0**	

SS 2 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

(1) Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja BPOM di Pangkalpinang tahun 2020 ditargetkan sebesar 75 % (Realisasi target di Triwulan IV).

SS 3 : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

(1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target Tahun 2020 sebesar 86 % (Realisasi di Triwulan IV).

(2) Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target tahun 2020 sebesar 74 % (Realisasi di Triwulan IV).

(3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Pangkalpinang target tahun 2020 sebesar 81,50% (Realisasi di Triwulan IV).

SS 4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

Tabel. 3.8 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	70%	98,46%	140,66%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	18%	42,50%	236,11%

	publik di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan			
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	30%	100%	333,33%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20%	28,57%	142,86%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20%	55,20%	276,00%
		Index Pelayanan Publik	-	0	-

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 6 (Dua) indikator sebagai berikut :

1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Yang Dilaksanakan

Tabel 3.9 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	70%	98,46%	140,66%	**Tidak dapat Disimpulkan**

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Realisasi persentase cakupan keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 98,46%.

Realisasi melebihi target yang ditentukan disebabkan karena semua Keputusan/ Rekomendasi telah ditindak lanjuti oleh UPT sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur timeline Pelaksanaan tindaklanjut hasil inspeksi dan juga beberapa rekomendasi yang yang dikirimkan ke Pusat telah ditindak lanjuti.

2. Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Tabel 3.10 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	18%	42,50%	236,11%	Tidak dapat Disimpulkan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil

pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah 42,50 % meningkat dari capaian ditriwulan 1, terjadinya peningkatan capaian disebabkan Balai POM di Pangkalpinang telah meningkat komunikasi dengan stake holder terkait diantaranya dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada stake holder yang belum merespon tidak lanjut agar segera menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Balai POM Pangkalpinang

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel. 3.11 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	30%	100%	333,33%	Tidak dapat Disimpulkan

a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan

7. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
8. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Hingga triwulan II tahun 2020 BPOM di Pangkalpinang keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang terhadap 7 Industri yang terdiri dari 2 Produk Industri Pangan Olahan dan 5 Sarana Distribusi Obat. Realisasi Capaian Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II Tahun 2020 di Wilayah Kerja Balai POM di Pangklapinang adalah Sebesar 333,33%.

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Tabel 3.12 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20%	28,57%	142,86%	Tidak dapat Disimpulkan

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan sampai dengan triwulan II tahun 2020 adalah 28,57%. Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan dilaksanakan di industri Pangan (AMDK, Pabrik Tapioka) dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Target sarana produksi direncanakan untuk diperiksa di bulan Februari namun karena keterbatasan SDM dan banyaknya kegiatan lain, sehingga diundur di bulan

Maret. Akan tetapi pada pelaksanaan di bulan Maret terkendala dengan terjadinya bencana wabah penyakit menular Covid19.

Definisi Operasional terkait Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan adalah :

a. Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

Memenuhi ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan

b. Sarana Produksi Obat Tradsional

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT

c. Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

d . Sarana Produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

e . Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.

- Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan.

Hal – hal yang mendukung pencapaian indikator kegiatan diatas adalah :

a. Perencanaan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang lebih baik.
b. Meningkatnya kompetensi dan skill dari petugas dalam melakukan pengawasan sarana produksi obat dan makanan.

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Tabel 3.13 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20%	55,20%	276,00%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi persentase cakupan sarana distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan sampai dengan triwulan II tahun 2020 adalah 55,20% dimana dari 125 jumlah sarana distribusi Obat yang diperiksa di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 69 sarana Memenuhi Ketentuan berdasarkan Definisi Operasional :

a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.
c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus.

d. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

e. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

6. Index Pelayanan Publik

Tabel 3.14 Index Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Index Pelayanan Publik	3,51	-	-	

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
b. Profesionalitas SDM (18%);
c. Sarana Prasarana (15%);
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
f. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM
b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Hasil penilaian Index Pelayanan Publik diberikan oleh Tim Penilai UPP BPOM. Pada Target Indikator, penilaian akan diberikan pada akhir triwulan IV(Empat).

SS 5 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di

Tabel 3.15 Sasaran Strategis 5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	94,38%	134,83%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	20% (Progress)	20% (Progress)
		Jumlah desa pangan aman	5	25% (Progress)	25% (Progress)
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	25% (Progress)	25% (Progress)

Masyakat yang cerdas adalah masyarakat yang dapat melindungi diri sendiri dari obat dan makanan yang beresiko terhadap obat dan makanan. Untuk itu peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting dalam bagian tugas BPOM untuk melindungi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

1. Persentase KIE Obat dan Makanan

Tabel 3.16 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	94,38%	134,83%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target 16 sekolah di tahun 2020 (Realisasi di Triwulan IV).
3. Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang dengan target 5 desa di tahun 2020 (Realisasi di Triwulan IV).
4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang, dengan target 1 pasar di tahun 2020 (Realisasi di Triwulan IV).

Sampai dengan triwulan II tahun 2020, Kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Desa Pangan Aman serta Pasar Aman dari Bahan Berbahaya baru mencapai target 20-25 %. Hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19, tetapi masih sesuai target yang telah ditetapkan di triwulan II.

SS 6 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

Tabel 3.17 Sasaran Strategis 6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
7.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40%	35,34%	88,35%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	39,86%	79,72%

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Tabel 3.18 Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40%	38,51%	96,27 %	**Baik**

Sampel Obat yang ditargetkan berturut-turut untuk produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik pada awal nya sebanyak 247, 180, 60, dan 356 (total 843 sampel) akan tetapi pada pelaksanaannya di tahun 2020 terjadi perubahan jumlah sampling dikarenakan terjadinya bencana wabah penyakit menular Covid19 menjadi 185, 135, 45, dan 267 (total 632 sampel). Jumlah sampel yang disampling berturut-turut untuk produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik pada triwulan II tahun 2020, sebanyak 32, 15, 07, dan 42 (total 96 sampel). Sedangkan sampling sampai dengan Triwulan II yaitu, 85, 67, 21, 113(total 404), Sedangkan sampel yang diuji sesuai standar sampai dengan triwulan II, 48, 56, 14, dan 88 (total 206 sampel). Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan membandingkan jumlah sampel yang diuji sesuai standar terhadap jumlah sampel yang

disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan kriteria Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar berdasarkan Definisi Operasional, adalah :

a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan
b. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling
c. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
d. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
e. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kriitis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji dimana standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.

2. Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Tabel 3.19 Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	42,73%	85,46%	**Cukup**

Sampel Makanan yang ditargetkan sebanyak 227 sampel, dimana pada pelaksanaannya disampling triwulan II tahun 2020 sebanyak 50 sampel. Sedangkan sampai dengan Triwulan II sebanyak 119 sampling. Dari yang disampling tersebut yang diuji di laboratorium menggunakan parameter kritis sebanyak 53 sampel pada triwulan II. Sedangkan sampai dengan triwulan II sesuai standar sebanyak 76 sampel uji. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan membandingkan jumlah sampel yang diuji sesuai standar terhadap jumlah sampel yang disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan kriteria Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar berdasarkan Definisi Operasional, adalah :

a. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling
b. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
c. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
d. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kriitis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji dimana standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.

SS 7 : Meningkatnya Efektivitas penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan di wilayah Kerja Balai POM di Pangkalpinang

Tabel 3.20 Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Efektivitas penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan di wilayah Kerja Balai POM di Pangkalpinang

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,50%	19,38%	86,13%	**Cukup**

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))

c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

3. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan juga merupakan salah satu upaya dalam menguatkan sistem pengawasan obat dan makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Selain itu kegiatan operasi terpadu oleh PPNS Balai POM di Pangkalpinang bersama stakeholder baik dalam bentuk Operasi Gabungan Daerah, Operasi Gabungan Nasional, Operasi Pangea, Operasi STORM cukup berkontribusi dalam capaian kasus pelanggaran Obat dan Makanan. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Untuk kasus pelanggaran obat dan makanan yang masuk pada ranah pidana, maka diproses secara hukum pidana.

Pada triwulan II tahun 2020, Balai POM di Pangkalpinang belum terdapat perkara yang ditangani. Akan tetapi terdapat Perkara yang Carry over tahun 2019 dengan rincian, 1 perkara telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkrach) dan 1 perkara menunggu putusan. Untuk meningkatkan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan perlu memaksimalkan gelar perkara sehingga proses pemberkasan lebih terarah dan dapat diselesaikan dengan secepatnya.

Memaksimalkan koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk membina kelancaran dalam proses pemberkasan serta Berkomunikasi dengan semua pihak yang dapat atau berpotensi untuk memberikan informasi terkait tindak pidana di bidang obat dan makanan

SS 8 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Pangkalpinang yang optimal

1. Indeks RB Balai POM di Pangkalpinang

Penilaian Indeks RB dilakukan oleh Inspektorat Utama. Nilai akan diterima pada triwulan ke-4 Tahun 2020, sehingga belum ada capaian di triwulan II. Pada Tahun 2020 Balai POM di Pangkalpinang telah mencanangkan pembangunan ZI (Zona Integritas) dengan melengkapi data dukung yang diperlukan. Balai POM juga telah melaksanakan beberapa program yang dibuat oleh *Agent of Change (AoC)* diantaranya yaitu:

a. Bedincak (Berdiskusi Intim, Cair, dan Asik)
b. Bapao (Broadcast Pagi Aok!)
c. Bang RoBee
d. Pembacaan Visi Misi, Budaya Organisasi, dan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi di Apel Disiplin (Senin Pagi, Seminggu Sekali)
e. Capacity Building
f. Menumbing (Minum Teh Ngumpul Bareng Sharing)

Dengan beberapa program tersebut diharapkan Balai POM di Pangkalpinang untuk kedepannya dapat mengimplementasikan nilai-nilai RB dan Meningkatkan Nilai RB agar lebih baik.

2. Nilai AKIP Balai POM di Pangkalpinang

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.
Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%)
2. Pengukuran Kinerja (25%)
3. Pelaporan Kinerja (15%)
4. Evaluasi Internal (10%)
5. Capaian Kinerja (20%)

Penilaian Nilai AKIP dilakukan oleh Inspektorat Utama. Nilai akan diterima pada triwulan ke-4 Tahun 2020, sehingga belum ada capaian di triwulan II.

SS 9 : Terwujudnya SDM Balai POM di Pangkalpinang yang Berkinerja Optimal

Terwujudnya SDM Balai POM di Pangkalpinang yang Berkinerja Optimal di ukur dengan indikator Indek Profesionalitas ASN Balai POM di Pangkalpinang. Pada Triwulan II Tahun 2020 belum terdapat realisasi Indeks Profesionalitas ASN karena pengukuran dilakukan oleh Biro Umum dan SDM Badan POM RI dan hasilnya disampaikan pada akhir tahun 2020.

SS 10 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 3.21 Sasaran Strategis 10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70%	-	
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	0,55	36,42

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Nilai Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh pada akhir Triwulan IV(Empat). Hasil nilai akan diperoleh dari Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

2. Index Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Pangkalpinang yang Optimal

Tabel 3.22 Index Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Pangkalpinang yang Optimal

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	0,55	36,42	**Sangat Kurang**

Realisasi Index Pengelolaan data dan Informasi Balai POM di Pangkalpinang yang optimal pada triwulan II diperoleh dari hasis Assesmen oleh Pusat Data dan Informasi yaitu sebesar 0,55.

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC

a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:
   1. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracuanan
   2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
   a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
   b. Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Dari hasil Penilaian oleh Pusat Data dan Informasi Badan POM, indeks Pengolahan Data dan Informasi Balai POM di Pangkalpinang masih sangat kecil yaitu 0,55, dimana terdapat data dan informasi yang belum dimutahirkan dan dimanfaatkan secara optimal.

Kendala yang dihadapi oleh Balai POM di Pangkalpinang dalam pemutahiran dan pemanfaatan data dan informasi ini antara lain :

1. Sistem SIPT versi terbaru yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) masih sangat banyak ditemui kendala, sehingga Balai tidak dapat menggunakan/ memanfaatkan SIPT ini secara optimal.
2. Pemanfaatan email corporate pom.go.id yang masih rendah, karena belum tersosialisasinya dengan baik terkait penggunaan email pom.go.id di tingkat seksi/sub.bagian dan individu.
3. Pemutahiran data yang masih rendah pada dashboard BCC, hal in berkaitan dengan pemanfaatan SIPT yang masih terkendala.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan BPOM di Pangkalpinang :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PUSDATIN untuk setiap kendala yang ditemui dalam penggunaan SIPT baik SIPT sarana maupun sampling.
2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Balai POM di Pangkalpinang untuk menggunakan email corporate pom.go.id untuk keluar masuk surat.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemutakhiran dan pemanfaatan data dan informasi pada SIPT, SPIMKER, BCC, Email dan Berita Aktual Balai POM di Pangkalpinang.

SS 11 : Terkelolanya Keuangan Balai POM di Pangkalpinang secara Akuntabel

Tabel 3.23 Sasaran Strategis11: Terkelolanya Keuangan Balai POM di Pangkalpinang secara Akuntabel

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
12.	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Pangkalpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkalpinang	93,00	51,61	55,49
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Pangkalpinang	Efisien (90%)	86,00	95,56

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 2 (Dua) indikator sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkalpinang

Tabel 3.24 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkalpinang

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Pangkalpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkalpinang	55%	51,61%	93,84%	**Baik**

Dalam mencapai Nilai kinerja anggaran dihitung melalui nilai EKA dan IKPA yang terdapat pada aplikasi smart DJA dan Om Span. Pada aplikasi tersebut nilai dihitung akumulasi sampai dengan akhir tahun, Sedangkan target triwulan ditetapkan untuk penilaian kinerja anggaran per triwulan. Perbedaan ini menyebabkan ketimpangan dalam capaian realisasi.

Dalam mencapai Nilai kinerja anggaran dihitung melalui nilai EKA dan IKPA yang terdapat pada aplikasi smart DJA dan Om Span. Untuk memperoleh nilai kinerja Anggaran yang BAIK, Balai POM di Pangkalpinang perlu memperhatikan indikator penilaian pada EKA dan IKPA, diantaranya :

1. Capaian Output (keluaran)
2. Konsistensi penyerapan anggaran dengan rencana penarikan dana yang telah dibuat.
3. Optimalisasi penyerapan anggaran
4. Pengelolaan UP dan TUP
5. Data kontrak sesuai dengan ketentuan
6. Pelaksanaan revisi DIPA dan Revisi halaman III DIPA sesuai dengan waktu yang ditentukan
7. Meminimalisir kesalaan SPM
8. Mengurangi Retur SPDP

2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Pangkalpinang

Tabel 3.25 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Pangkalpinang

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Pangkalpinang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Anggaran Balai POM di Pangkalpinang	Efisien (90%)	86,00	95,56	**Baik**

Dalam penghitungan triwulan II, persentase capaian input 95,56%, sehingga Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggara Balai POM di pangkalpinang adalah Efisien.

Kendala yang ditemukan dalam penghitungan tingkat efisiensi anggaran triwulan adalah metode penghitungan untuk kegiatan yang keluaran/output baru dapat ditentukan pada akhir tahun. Selain itu, penghitungan tingkat efisiensi anggaran yang dilakukan secara triwulan dengan menggunakan Rencana penarikan anggaran pada penghitungan input, menyebabkan nilai tingkat efisiensi menjadi negatif (minus) apabila serapan anggaran lebih besar dari Rencana penarikan dana yang dibuat. Namun dengan adanya rumus perhitungan tingkata efisiensi anggaran yang ditentukan oleh Badan POM, kendala ini telah dapat teratasi.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2020 Balai POM di Pangkalpinang memperoleh anggaran sebesar Rp 20.831.967.000 Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya diupayakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan penyalahgunaan.

Pada bulan April 2020, dilakukan refocusing anggaran APBNP terkait adanya Pandemi Covid-19, sehingga anggaran Balai POM di Pangkalpinang berkurang dari Rp. 20.831.967.000 menjadi Rp. 16.445.716.000**.** Pada Triwulan II tahun 2020 realisasi anggaran Balai POM di Pangkalpinang yaitu sebesar 36,74%. Apabila dilihat dari sasaran, anggaran dan realisasi anggaran Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Tiap Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	(%)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp 171.423.000	Rp 29.243.975	17,06
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp 52.240.000	Rp 11.459.850	21,94
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 45.130.000	Rp 8.518.900	18,88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 10.923.000	Rp 3.013.300	27,59
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Rp 14.380.000	Rp 4.284.201	29,79
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rp 3.600.000	Rp -	0
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Rp 193.837.000	Rp 41.947.503	21,64

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	(%)
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Rp 119.028.000	Rp 24.568.800	20,64
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp 46.000.000	Rp 14.493.448	31,51
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp 40.640.000	Rp 2.430.000	5,98
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp 34.620.000	Rp 4.440.000	12,82
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 32.150.000	Rp 400.000	1,24
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 431.707.000	Rp 99.394.654	23,02
		Index Pelayanan Publik	Rp 101.815.000	Rp 6.453.000	6,34
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp 554.646.000	Rp 249.474.500	44,98
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Rp 293.429.000	Rp 57.758.500	19,68

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	(%)
		Jumlah desa pangan aman	Rp 559.070.000	Rp 190.927.560	34,15
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Rp 94.860.000	Rp 29.256.000	30,84
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 171.574.000	Rp -	0
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 110.975.000	Rp -	0
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp 25.797.000	Rp 12.832.902	49,75
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Pangkalpinang yang optimal	Indeks RB UPT	Rp 818.687.000	Rp 410.912.385	50,19
		Nilai AKIP UPT	Rp 95.498.000	Rp 16.123.300	16,88
9.	Terwujudnya SDM Balai POM di Pangkalpinang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rp 431.894.000	Rp 37.331.200	8,64
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rp 1.284.814.000	Rp 141.566.235	11,02

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	(%)
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rp 46.404.000	Rp 42.084.500	90,69
11.	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Pangkalpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Rp 8.074.036.000	Rp 3.419.413.042	42,35
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Rp 2.586.539.000	Rp 1.183.264.494	45,75
TOTAL			**Rp 16.445.716.000**	**Rp 6.041.592.249**	**36,74**

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah Alokasi anggaran terbesar yaitu pada sasaran yang kedua belas yaitu **"**Terkelolanya Keuangan BPOM di Pangkalpinang", hal ini dikarenakan adanya Layanan perkantoran dan Layanan dukunga teknis.

Realisasi anggaran Balai POM di Pangkalpinang sampai dengan triwulan II belum optimal dikarenakan adanya Pandemi COVID-19, sehingga mengakibatkan sebagian besar kegiatan yang mendukung sasaran strategis tidak dapat berjalan secara optimal, diantaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana
2. Pelaksanaan kegiatan sampling, sehingga berpengaruh juga pada kegiatan pengujian di laboratorium.
3. Pelaksanaan kegiatan KIE berupa pertemuan/ mengumpulkan masa.

Balai POM di Pangkalpinang tetap melakukan pengawasan obat dan makanan secara daring/online dan meningkatkan pelaksanaan KIE melalui media sosial, namun hal ini tentu saja menyebabkan penyerapan angaran tetap tidak optimal.

Dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran Balai POM di Pangkalpinang pada triwulan berikutnya, diambil langkah-langka sebagai berikut :

1. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana triwulan III dan IV
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada triwulan III dan IV

3. Melakukan revisi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dimasa pandemic covid.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi kegiatan adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ \text{Rencana Capaian Output}}{\%\ \text{Rencana Capaian Input}}$$

$$= \frac{100\%}{100\%}$$

$$= 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengam membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam hal pengukuran ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

BAB IV
PENUTUP

Pada Triwulan II Tahun 2020 Renstra Balai POM di Pangkalpinang belum selesai disusun, sehingga evaluasi Triwulan II Tahun 2020 ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang mengacu pada Renja BPOM. Secara garis besar, pencapaian kinerja Balai POM di Pangkalpinang dinilai dari 11 sasaran strategis dan 28 Indikator kinerja yang ditetapkan. Dari 28 indikator kinerja tersebut hanya 15 indikator yang dapat diukur, indikator lainnya hanya dapat diukur pada akhir tahun 2020. Diantaranya sebagai berikut.

1. 5 (Empat) Indikator dengan kategori Baik yaitu: 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat, 3.Nilai Kinerja Anggaran, 4. Presentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standart 5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran.
2. 3 (Tiga) Indikator dengan kategori Cukup yaitu:1. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan, 2. Presentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, 3. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
3. 7 (Tujuh) indikator dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, yaitu: 1. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan, 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 3. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, 4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, 5. Presentase sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan, 6. Presentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan, 7. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.

Dengan pencapaian kinerja tersebut, Balai POM di Pangkalpinang telah melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Balai POM di Pangkalpinang antara lain adalah.

1. Telah dilakukan penyesuaian kegiatan pengujian dengan memasukkan rencana di triwulan III.
2. Pemeriksaan akan mulai dilaksanakan setelah terbit SK New Normal.
3. Sesuai dengan PoA bahwa rencana pemeriksaan produksi ada di TW II, sedangkan pada TW II sudah memasuki masa Pandemi Covid19 sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan.
4. Pada Triwulan 3 dan 4 akan dimaksimalkan pemeriksaan setelah diberlakukan new normal.
5. Kegiatan PI akan dilaksanakan setelah masa pandemi Covid 19 berakhir.
6. Untuk kegiatan koordinasi lintas sektor akan dijadwalkan ulang pada Triwulan 3, sedangkan untuk koordinasi dengan Balai koordinasi tetap dilaksanakan namun secara virtual.
7. Melanjutkan pemeriksaan terhadap sarana sesuai target yang belum diperiksa dengan fasilitas dan/atau histori yang kurang.

Selanjutnya diharapkan semua pegawai di Balai POM di Pangkalpinang tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja masing-masing individu sehingga capaian kinerja Balai POM di Pangkalpinang dapat terus meningkat.

LAMPIRAN

Lampiran 1

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG TAHUN 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	81,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	47

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	70
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	5
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	81
		Nilai AKIP UPT	81

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (90%)

Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	81,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	90

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	70
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	5
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	81
		Nilai AKIP UPT	81
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (90%)

Lampiran 3

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	80,8	80,8	80,8	171.423.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	52.240.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	78	78	78	45.130.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	70	70	70	10.923.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	75	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	86	-
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	74	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	81,50	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana	60	70	80	90	-

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	produksi dan distribusi yang dilaksanakan					
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	6	18	32	47	86.640.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	0	30	60	85	38.220.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	20	20	20	32.150.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	20	20	20	625.544.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	70	70	70	789.869.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	-	-	16	293.429.000
		Jumlah desa pangan aman	-	-	-	5	559.070.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	-	-	-	1	94.860.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30	40	50	55	171.574.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	50	70	83	110.975.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,5	22,5	34	45	368.427.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT						
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	-	-	-	81	2.586.539.000
		Nilai AKIP UPT	-	-	-	81	914.185.000
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	75	10.660.575.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	70	1.374.078.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	-	-	1,51	46.404.000
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	93	-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	-

Lampiran 4

Perhitungan Tingkat Efisiensi s.d Triwulan II Balai POM di Pangkalpinang

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	76,33	94,47	171.423.000	29.243.975	17,06	**5,54**	**4,54**	**75 %**
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	70,97	90,99	52.240.000	11.459.850	21,94	**4,15**	**3,15**	**75 %**
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu	78	62,79	80,50	45.130.000	8.518.900	18,88	**4,26**	**3,26**	**75 %**
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu	70	100	142,86	10.923.000	3.013.300	27,59	**5,18**	**4,18**	**75 %**
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	90	98,46	109,40	46.000.000	14.493.448	31,51	**3,47**	**2,47**	**75 %**
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	47	42,5	90,43	40.640.000	2.430.000	5,98	**15,12**	**14,12**	**75 %**
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	85	100	117,65	34.620.000	4.440.000	12,82	**9,17**	**8,17**	**75 %**
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan	20	28,57	142,85	32.150.000	400.000	1,24	**114,82**	**113,82**	**75 %**
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan	20	55,2	276,00	431.707.000	99.394.654	23,02	**11,99**	**10,99**	**75 %**
14	Indeks Pelayanan Publik	3,51		0,00	101.815.000	6.453.000	6,34	**0,00**	**-1,00**	**75 %**
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	94,38	134,83	554.646.000	249.474.500	44,98	**3,00**	**2,00**	**75 %**
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak	16	Progres	20,00	293.429.000	57.758.500	19,68	**1,02**	**0,02**	**100 %**
17	Jumlah desa pangan aman	5	Progres	25,00	559.070.000	190.927.560	34,15	**0,73**	**-0,27**	**75 %**
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	Progres	25,00	94.860.000	29.256.000	30,84	**0,81**	**-0,19**	**75 %**
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan	55	35,34	64,25	171.574.000	0	0,00	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan	83	39,86	48,02	110.975.000	0	0,00	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan	45	19,38	43,07	25.797.000	12.832.902	49,75	**0,87**	**-0,13**	**75 %**
26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT	1,51	0,55	36,42	46.404.000	42.084.500	90,69	**0,40**	**-0,60**	**75 %**
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	40	43,01	8.074.036.000	3.419.413.042	42,35	**1,02**	**0,02**	**100 %**
	TOTAL			83,41	10.897.439.000	4.181.594.131	38,37	**2,17**	**1,17**	**86 %**

Lampiran 5

Keberhasilan Peningkatan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Balai POM di Pangkalpinang

UPT		Tahapan	s.d TW II (Jan - Juni)										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Pangkal Pinang	Pangkal Pinang	**SPDP**	3	4	0		0		0,15	0,00%	38,75%	57,14%	22,14%
		Tahap I			0	0	0	1,00	0,4	20,00%			
		P21			0	2	0	1,00	0,3	15,00%			
		Tahap II			0	2	0	0,50	0,15	3,75%			
		Total	3	4	0	4							
	Kabupaten Belitung	**SPDP**	1	0	0		0		0,15	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Tahap I			0	0	0	0	0,4	0%			
		P21			0	0	0	0	0,3	0%			
		Tahap II			0	0	0	0	0,15	0%			
		Total	1	0	0	0							
	-	**SPDP**		0			0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00%
		Tahap I					0	0	0,4	0%			
		P21					0	0	0,3	0%			
		Tahap II					0	0	0,15	0%			
		Total	0	0	0	0							
	TOTAL	**SPDP**	4	4	0		0		0,15	0,00%	38,75%	50,00%	19,38%
		Tahap I			0	0	0	1,00	0,4	20,00%			
		P21			0	2	0	1,00	0,3	15,00%			
		Tahap II			0	2	0	0,50	0,15	3,75%			
		Total	4	4	0	4							

Lampiran 6

Sampling Pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Pangkalpinang

No	UPT	No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Total															RAPK 2020
							Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yg selesai diperiksa)	
								TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS							
															MK Penandaan dan TMS uji lab	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)				
32	Pangkal pinang	**Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar**																				
		1	Obat	Pangkal Pinang		Targeted	8	0	0	0	0	8	6	6	0	0	0	0	0	2	6	
				Kabupaten Belitung			4	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	2	2	
				-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Pangkal Pinang		Random	62	0	0	0	0	62	39	39	0	0	0	0	0	23	39	
				Kabupaten Belitung			11	0	0	0	1	11	7	7	0	0	0	0	0	4	7	
				-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TOTAL	0		85	0	0	0	1	85	54	54	0	0	0	0	0	31	54	100,00
		2	Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Pangkal Pinang		Targeted	18	0	0	0	9	18	16	6	2	6	2	0	10	2	16	
				Kabupaten Belitung			1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
				-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Pangkal Pinang		Random	34	0	0	0	17	34	30	15	0	15	0	0	15	4	30	
				Kabupaten Belitung			14	0	0	0	5	14	10	7	0	3	0	0	3	4	10	
				-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TOTAL	0		67	0	0	0	32	67	56	28	2	24	2	0	28	11	56	50,00
		3	Suplemen Kesehatan	Pangkal Pinang		Targeted	4	0	0	0	1	4	1	1	0	0	0	0	0	3	1	
				Kabupaten Belitung			1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
				-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Pangkal Pinang		Random	12	0	0	0	1	12	10	7	2	1	0	0	3	2	10	
				Kabupaten Belitung			4	0	0	0	0	4	3	2	1	0	0	0	1	1	3	
				-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TOTAL	0		21	0	0	0	2	21	14	10	3	1	0	0	4	7	14	71,43
		4	Kosmetik	Pangkal Pinang		Targeted	29	0	0	0	5	29	16	12	0	4	0	0	4	13	16	
				Kabupaten Belitung			5	0	0	0	2	5	2	0	0	2	0	0	2	3	2	
				-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Pangkal Pinang		Random	61	0	0	0	12	61	56	45	0	11	0	0	11	5	56	
				Kabupaten Belitung			18	0	0	0	9	18	14	7	0	7	0	0	7	4	14	
				-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TOTAL	0		113	0	0	0	28	113	88	64	0	24	0	0	24	25	88	72,73

	Total Obat		0	Targeted	12	0	0	0	0	12	8	8	0	0	0	0	0	4	8	100,00
	Total Obat Tradisional		0		19	0	0	0	10	19	16	6	2	6	2	0	10	3	16	37,50
	Total Suplemen Kesehatan		0		5	0	0	0	1	5	1	1	0	0	0	0	0	4	1	100,00
	Total Kosmetik		0		34	0	0	0	7	34	18	12	0	6	0	0	6	16	18	66,67
	Pangkal Pinang		0	Targeted	59	0	0	0	15	59	39	25	2	10	2	0	14	20	39	64,10
	Kabupaten Belitung		0		11	0	0	0	3	11	4	2	0	2	0	0	2	7	4	50,00
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos		0		70	0	0	0	18	70	43	27	2	12	2	0	16	27	43	62,79
	Total Obat		0	Random	73	0	0	0	1	73	46	46	0	0	0	0	0	27	46	100,00
	Total Obat Tradisional		0		48	0	0	0	22	48	40	22	0	18	0	0	18	8	40	55,00
	Total Suplemen Kesehatan		0		16	0	0	0	1	16	13	9	3	1	0	0	4	3	13	69,23
	Total Kosmetik		0		79	0	0	0	21	79	70	52	0	18	0	0	18	9	70	74,29
	Pangkal Pinang		0	Random	169	0	0	0	30	169	135	106	2	27	0	0	29	34	135	78,52
	Kabupaten Belitung		0		47	0	0	0	15	47	34	23	1	10	0	0	11	13	34	67,65
	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos		0		216	0	0	0	45	216	169	129	3	37	0	0	40	47	169	76,33
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos		0		286	0	0	0	63	286	212	156	5	49	2	0	56	74	212	73,58
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	Pangkal Pinang		Targeted	62	0	0	0	9	62	41	41	0	0	0	0	0	21	41	100,00
	0	Kabupaten Belitung			4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4	100,00
	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	0	Pangkal Pinang		Random	38	0	0	0	4	38	20	17	0	3	0	0	3	18	20	85,00
	0	Kabupaten Belitung			14	0	0	0	9	14	11	5	0	6	0	0	6	3	11	45,45
	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Total Pangan		0	Targeted	66	0	0	0	9	66	45	45	0	0	0	0	0	21	45	100,00
	Total Pangan		0	Random	52	0	0	0	13	52	31	22	0	9	0	0	9	21	31	70,97
	TOTAL PANGAN		0		118	0	0	0	22	118	76	67	0	9	0	0	9	42	76	88,16

Lampiran 7

Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan Balai POM di Pangkalpinang

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	RAPK s.d. TW 2 (Jan - Juni)			
					Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	Pangkalpinang	0	0				
		Kabupaten Belitung	0	0				
		-						
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab	Pangkalpinang	0	0				
		Kabupaten Belitung	0	0				
		-						
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	Pangkalpinang	0	0				
		Kabupaten Belitung	0	0				
		-						
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
4	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Pangkalpinang	0	0				
		Kabupaten Belitung	0	0				
		-						
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Pangkalpinang	0	0				
		Kabupaten Belitung	0	0				
		-						
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pangkalpinang	1	1				
		Kabupaten Belitung	0	0				
		-						
		TOTAL	1	1	0	0	0	0

7	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Pangkalpinang	0	0				
		Kabupaten Belitung	0	0				
		-						
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
8	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Pangkalpinang	0	0				
		Kabupaten Belitung	0	0				
		-						
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
9	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Pangkalpinang	0	0				
		Kabupaten Belitung	0	0				
		-						
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
10	Industri Kosmetik	Pangkalpinang	0	0				
		Kabupaten Belitung	0	0				
		-						
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
11	Industri Pangan	Pangkalpinang	10	10				
		Kabupaten Belitung	8	8				
		-						
		TOTAL	18	18	2	2	0	100,00
12	Industri Rumah Tangga Pangan	Pangkalpinang	592	20				
		Kabupaten Belitung	314	17				
		-						
		TOTAL	906	37	5	0	5	0,00
	Pangkalpinang		603	31	2	2	0	100,00
	Kabupaten Belitung		322	25	5	0	5	0,00
	-		0	0	0	0	0	0
	TOTAL		925	56	7	2	5	28,57

Lampiran 8

Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Balai POM di Pangkalpinang

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	RAPK s.d. TW 2 (Jan - Juni)			
					Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Pangkalpinang						
		Kabupaten Belitung	2	2				
		-						
		TOTAL	2	2	2	0	2	0,00
2	Apotek	Pangkalpinang						
		Kabupaten Belitung	33	23				
		-						
		TOTAL	33	23	27	8	19	29,63
3	Toko Obat	Pangkalpinang						
		Kabupaten Belitung	44	13				
		-						
		TOTAL	44	13	8	3	5	37,50
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Pangkalpinang						
		Kabupaten Belitung	4	4				
		-						
		TOTAL	4	4	0	0	0	0
5	Rumah Sakit (RS)	Pangkalpinang						
		Kabupaten Belitung	2	2				
		-						
		TOTAL	2	2	2	0	2	0,00
6	Puskemas	Pangkalpinang						
		Kabupaten Belitung	16	11				
		-						
		TOTAL	16	11	7	3	4	42,86
7	Klinik	Pangkalpinang						
		Kabupaten Belitung	17	9				
		-						
		TOTAL	17	9	3	1	2	33,33

8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Pangkalpinang						
		Kabupaten Belitung	0	0				
		-						
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Pangkalpinang						
		Kabupaten Belitung	8	4				
		-						
		TOTAL	8	4	4	1	3	25,00
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Pangkalpinang						
		Kabupaten Belitung	0	0				
		-						
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Pangkalpinang						
		Kabupaten Belitung	38	11				
		-						
		TOTAL	38	11	9	6	3	66,67
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	Pangkalpinang						
		Kabupaten Belitung	617	63				
		-						
		TOTAL	617	63	63	47	16	74,60
	Pangkalpinang		0	0	80	46	34	57,50
	Kabupaten Belitung		781	142	45	23	22	51,11
	-		0	0	0	0	0	0
	TOTAL		781	142	125	69	56	55,20

Lampiran 9

Sertifikasi Obat dan Makanan Balai POM di Pangkalpinang

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	RAPK s.d TW II (Jan - Juni)		
				Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Pangkal Pinang			
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Pangkal Pinang			
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
Total			Pangkal Pinang	7	7	100,00
			Kabupaten Belitung	0	0	0
			-	0	0	0
			Total	7	7	100,00

Lampiran 10

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Balai POM di Pangkalpinang

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	RAPK s.d TW II (Jan - Juni)		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Suplemen Kesehatan	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Kosmetik	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Pangan	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
			Pangkal Pinang	82	82	100,00
			Kabupaten Belitung	0	0	0
			-	0	0	0
			Total	82	82	100,00

2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Suplemen Kesehatan	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Kosmetik	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Pangan	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
			Pangkal Pinang	86	31	277,42
			Kabupaten Belitung	67	69	97,10
			-	0	0	0
			Total	153	100	153,00

3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Suplemen Kesehatan	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Kosmetik	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Pangan	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
			Pangkal Pinang	25	59	42,37
			Kabupaten Belitung	0	0	0
			-	0	0	0
			Total	25	59	42,37

4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Suplemen Kesehatan	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Kosmetik	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Pangan	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
			Pangkal Pinang	0	0	0
			Kabupaten Belitung	0	0	0
			-	0	0	0
			Total	0	0	0
TOTAL			**Pangkal Pinang**			139,93
			Kabupaten Belitung			97,10
			-			#DIV/0!
			total			98,46

Lampiran 11

Keputusan/rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	RAPK s.d TW II (Jan - Juni)		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Suplemen Kesehatan	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Kosmetik	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Pangan	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
			Pangkal Pinang	8	35	22,86
			Kabupaten Belitung	13	25	52,00
			-	0	0	0
			Total	21	60	35,00

2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Suplemen Kesehatan	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Kosmetik	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
		Pangan	Pangkal Pinang			
			Kabupaten Belitung			
			-			
			TOTAL			
			Pangkal Pinang	0	0	0
			Kabupaten Belitung	1	2	50,00
			-	0	0	0
			Total	1	2	50,00
TOTAL			**Pangkal Pinang**			22,86
			Kabupaten Belitung			51,00
			-			#DIV/0!
			total			42,50

Lampiran 12

Kie Dipa Balai POM di Pangkalpinang

No	Kegiatan		BPOM PANGKAL PINANG												
			Frekuensi/Jumlah												Total
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Layanan informasi a)	Pangkal Pinang	6	4	16	25	19	35							105
		Kabupaten Belitung	5	7	4	5	4	9							34
		-													0
2	Layanan pengaduan b)	Pangkal Pinang	0	0	1	0	1	0							2
		Kabupaten Belitung	2	0	0	0	0	0							2
		-													0
3	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti c)	Pangkal Pinang	0	0	1	0	1	0							2
		Kabupaten Belitung	2	0	0	0	0	0							2
		-													0
4	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat d)	Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0							0
		Kabupaten Belitung	0	0	0	0	0	0							0
		-													0
5	KIE di Area *Car Free Day* (CFD), Pameran, Sosialisasi e)	Pangkal Pinang	0	2	0	0	0	0							2
		Kabupaten Belitung	1	1	0	0	0	1							3
		-													0
6	Edukasi (KIE) melalui media sosial f)	Pangkal Pinang	6	9	15	32	30	25							117
		Kabupaten Belitung	9	9	17	17	18	26							96
		-													0
7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak g)	Pangkal Pinang	0	0	1	2	2	1							6
		Kabupaten Belitung	0	0	0	1	1	1							3
		-													0
8	Sebagai Narasumber h)	Pangkal Pinang	0	2	0	2	3	2							9
		Kabupaten Belitung	0	0	0	0	0	2							2
		-													0
	Total	Pangkal Pinang	12	17	34	61	56	63	0	0	0	0	0	0	243
		Kabupaten Belitung	19	17	21	23	23	39	0	0	0	0	0	0	142
		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	31	34	55	84	79	102	0	0	0	0	0	0	385

Lampiran 13
KIE Non Dipa Balai POM di Pangkalpinang

No	Kegiatan		BPOM PANGKAL PINANG												
			Frekuensi/Jumlah												Total
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	CFD, Pameran, Sosialisasi, Penyuluhan i)	BB/BPOM di	0	0	0	0	0	0							0
		Loka Kab/Kota	0	0	0	0	0	0							0
		Loka Kab/Kota													0
2	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak	BB/BPOM di	0	0	0	0	0	0							0
		Loka Kab/Kota	0	0	0	0	0	0							0
		Loka Kab/Kota													0
3	Sebagai Narasumber k)	BB/BPOM di	0	0	0	0	0	0							0
		Loka Kab/Kota	1	1	2	0	0	0							4
		Loka Kab/Kota													0
	Total	BB/BPOM di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Loka Kab/Kota	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		Loka Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Lampiran 14

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai POM di Pangkalpinang

No	UPT	Indikator 15			
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			
		s.d TW I	s.d TW	s.d TW III	s.d TW IV
	CONTOH	**-**	**68,5**	**69,5**	**70**
32	Pangkal	-	94,38		

Lampiran 15

Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

No	UPT	Indikator 19																
		Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar																
		s.d TW I (Jan - Mar)				s.d TW II (Jan-Juni)				s.d TW III (Jan-Sept)				s.d TW IV (Jan-Des)				
		Sampel	Sampel	Target	%	Sampel	Sampel	Target	%	Sampel	Sampel	Target	%	Sampel	Sampel	Target	Sampel	%
	CONTOH	**20**	**10**	**150**	10,00	**40**	**25**	**120**	27,08	**80**	**60**	**120**	58,33	**120**	**110**	**120**	**110**	100,00
32	Pangkal	145	80	631	17,83	241	205	631	35,34			631	0,00			631		#DIV/0!

Lampiran 16

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

No	UPT	Indikator 20																
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar																
		s.d TW I (Jan - Mar)				s.d TW II (Jan-Juni)				s.d TW III (Jan-Sept)				s.d TW IV (Jan-Des)				
		Sampel	Sampel	Target	%	Sampel	Sampel	Target	%	Sampel	Sampel	Target	%	Sampel	Sampel	Target	Sampel	%
	CONTOH	**20**	**10**	**150**	10,00	**40**	**25**	**120**	27,08	**80**	**60**	**120**	58,33	**120**	**110**	**120**	**110**	100,00
32	Pangkal	60	23	227	18,28	105	76	227	39,87			227	0,00			227		#DIV/0!

Lampiran 17

Index Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Pangkalpinang yang Optimal dan Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkalpinang yang Optimal

No	UPT	Indikator 26				Indikator 27											
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal				Nilai Kinerja Anggaran UPT											
						s.d TW I (Jan-Mar)			s.d TW II (Jan-Jun)			s.d TW III (Jan-Sept)			s.d TW IV (Jan-Des)		
		s.d TW	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW	EKA	IKPA	Capaia	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian
	CONTOH	-	1,4	1,45	1,54	19,5	100	51,7	43	100	65,8	67	100	80,2	90	100	94
32	Pangkal	-	0,55			11,3	100	46,798	19,4	100	51,616		100	40		100	40

Lampiran 18

Tingkat Efisiensi Anggaran Balai POM di Pangkalpinang

No	UPT	Indikator 27													
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT													
		s.d TW I (Jan-Mar)							s.d TW II (Jan-Jun)							
		Output (indikator)	Input (anggaran)			IE	TE	Capaian	Output (indikator)	Input (anggaran)			IE	TE	Capaian
		%	Total Target (RP)	Total capaian (RP)	%				%	Total Target (RP)	Total capaian (RP)	%			
	CONTOH	**20**	**140.000**	**30.000**	**21,43**	**0,93**	**-0,07**	**75%**	**50,00**	**140.000**	**33.000**	**23,57**	**2,12**	**1,12**	**86%**
32	Pangkal				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**	83,41	10.897.479.000	4.181.594.131	38,37	2,17	1,17	**86%**